

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang perikanan dan kelautan memegang peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional, terutama untuk menyediakan bahan pangan berprotein, meningkatkan devisa negara, dan kesempatan kerja. Namun, meskipun bidang perikanan dan kelautan di Indonesia dikelola dengan baik, masih belum mampu menarik perhatian pemerintah dan pengusaha. Padahal, jika bidang perikanan dan kelautan diperhatikan secara khusus dapat menyokong pertumbuhan perekonomian nasional dan menyejahterakan masyarakat nelayan.

Terletak strategis di bagian timur laut Pulau Jawa, Kabupaten Pati dengan pesisirnya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, telah lama dikenal sebagai salah satu lumbung ikan di Indonesia. Potensi perikanan yang melimpah ini didukung oleh kondisi geografis yang menguntungkan dan keberadaan sejumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), seperti TPI Juwana Unit II. TPI merupakan tempat yang penting bagi sektor kelautan dan perikanan karena terjadi aktivitas perikanan yang dimulai dari pendaratan, pembongkaran, hingga pemasaran. TPI menjadi aktivitas transaksi jual beli antara nelayan dan pedagang dalam skala jumlah kecil hingga besar yang dapat berasal dari bermacam-macam daerah. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pengoperasian lelang di TPI Juwana Unit II dibuka setiap hari dari pukul 07.30 WIB hingga 17.00 WIB oleh pihak TPI. Alur pelelangan ikan dimulai dengan penimbangan

ikan, kegiatan jual beli yang dipandu oleh juru lelang, dan penyimpanan data oleh admin SIIPA.

Pada praktiknya, sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II masih mengandalkan cara tradisional dengan pembayaran dilakukan secara tunai di akhir transaksi. Sistem tradisional dengan metode pembayaran tunai yang diterapkan dalam kegiatan pelelangan ikan di TPI Juwana unit II ini berarti pedagang ikan atau pembakul yang membeli ikan dari nelayan pada saat pelelangan harus membayar di hari itu juga, sesuai aturan yang berlaku. Sasaran atau tujuan adanya sistem pelelangan tradisional ini adalah menghindari kecurangan, sehingga nelayan dapat segera mendapatkan pendapatan mereka dan dikelola untuk modal kembali berlayar.

Pada masa awal berdirinya TPI Juwana unit II, sistem tradisional yang diterapkan dirasa telah memberikan dampak baik bagi para nelayan. Nelayan telah mendapat kenaikan pendapatan sehingga menimbulkan dorongan untuk menangkap ikan di laut. Seiring berjalannya waktu, TPI Juwana unit II telah mengalami perkembangan dan menjadi semakin ramai. Kegiatan pelelangan ikan pun menjadi tidak kondusif dan urusan pembayaran menjadi tidak terkendali. Kondisi seperti ini yang hanya bertahan dalam beberapa waktu nampaknya dimanfaatkan para bakul ikan untuk memperlalaikan pembayaran dengan alasan nelayan sibuk mengurus pembayaran bakul ikan yang lain.

Bagi para nelayan yang kurang mampu mengelola aktivitas pelelangan kelompoknya, pada awalnya merasa terbantu karena hal ini. Namun, tindakan memperlalaikan pembayaran yang dilakukan oleh beberapa bakul ikan ini kemudian

diikuti oleh bakul ikan lainnya untuk berbuat curang. Para bakul ikan menjadi sering beralasan bahwa ikan yang dibeli belum semuanya terjual dan belum mendapat untung dari penjualan sebelumnya, sehingga tidak memberi uang muka kepada nelayan. Kekurangan pembayaran lelang ikan (KPLI) yang baru saja berkembang ini sangat merugikan dan berakibat fatal bagi para nelayan. Hal ini mengakibatkan lamanya proses lelang, tidak terbuka, menurunnya kualitas pelayanan, ketidakpuasan pihak yang terlibat, dan nelayan tidak memiliki modal yang cukup untuk berlayar karena menurunnya pendapatan.

Nelayan sebagai pihak yang membutuhkan uang, tidak berani melawan para bakul yang berbuat curang. Mereka hanya akan menegur para bakul dan memohon untuk setidaknya memberikan uang muka minimal ketika melelang ikan. Namun, upaya ini tidak terlalu membuahkan hasil karena dari pihak mandor dan juru lelang kurang dapat membantu menyelesaikan masalah ini.

Setelah mengetahui permasalahan yang dilakukan oleh para bakul ikan, maka akar permasalahan ini berada pada sistem pelelangan ikan yang diterapkan. Timbulnya permasalahan yang merugikan banyak pihak dapat membuktikan bahwa sistem ini sudah tidak efektif dan efisien sebagai dasar aktivitas pelelangan ikan di TPI Juwana unit II.

Untuk mengatasi permasalahan pelelangan ikan, pemerintah Kabupaten Pati memiliki sebuah inovasi untuk melakukan transformasi digital terhadap sistem pelelangan ikan yang selama ini telah berjalan. Mengingat sistem yang dulu sudah tidak lagi efektif, hal ini penting untuk dapat segera dilakukan perubahan. Transformasi yang

akan dilakukan adalah mengubah sistem pelelangan ikan tradisional menjadi Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) agar memudahkan proses administrasi pelelangan ikan di TPI Juwana unit II Pati (Kemenpanrb, 2020)

Agar penelitian ini menjadi semakin logis dan benar, dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan yang dapat dipertimbangkan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipertimbangkan untuk bahan perbandingan adalah sejumlah penelitian yang membahas tentang manajemen pelelangan ikan yang menunjukkan hasil bahwa seluruh TPI di Indonesia masih menggunakan sistem pelelangan ikan tradisional dengan pembayaran tunai. Terdapat satu penelitian baru pada tahun 2024 yang membahas tentang SIPIPA, yaitu penelitian dari (Alfina, 2024) yang berjudul Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Lelang di Kabupaten Pati. Ditemui sebuah kesamaan pada topik pembahasan SIPIPA, namun juga memiliki perbedaan yang terletak pada teori yang digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa topik penelitian tentang SIPIPA merupakan sebuah hal yang baru, sehingga referensi yang dapat digunakan masih sedikit. Ini menjadikan penelitian ini penting dan menarik karena untuk memperbarui bahan penelitian yang ada.

Dengan demikian, mengacu pada penjelasan sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana proses transformasi terhadap sistem pelelangan ikan terjadi, dimulai dari sistem pelelangan ikan tradisional yang diberi sentuhan digitalisasi, sehingga proses transformasi digital pada sistem pelelangan ikan dapat terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana sistem pelelangan ikan secara tradisional di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati?
2. Bagaimana digitalisasi sistem pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati?
3. Apakah transformasi digital pada sistem pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati berhasil dilakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini antara lain;

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pelelangan ikan secara tradisional di TPI Juwana unit II Kabupaten Pati.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis transformasi digital pada sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II Kabupaten Pati.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis keberhasilan transformasi digital pada sistem pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan membawa berbagai manfaat antara lain.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian tentang transformasi sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II, dapat menjadi penunjang ilmu pengetahuan pada bidang ilmu pemerintahan terkhusus dalam pengembangan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi sistem pelelangan ikan tradisional di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu membuat informasi semakin bertambah dan dapat membandingkan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian lainnya. Tidak hanya itu, adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penulis dalam penelitiannya. Jika dilihat dari berbagai penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian serupa dengan judul penelitian yang dibawakan oleh peneliti. Namun, adanya penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti terkait penelitiannya. Penelitian terdahulunya antara lain:

Tabel 1.1 Daftar Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1	Harirotul Ihtiromah (2018). “Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Manajemen sistem dan sistem lelang dalam islam	Kualitatif deskriptif	1 TPI Tasik Agung Rembang menerapkan sistem lelang terbuka dengan mekanisme penawaran harga tertinggi secara lisan. Institusi ini juga memiliki tata kelola yang baik, ditandai dengan adanya perencanaan kegiatan yang komprehensif, meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktur organisasi yang jelas, serta pelaksanaan teknis pelelangan yang terstruktur. 2 Sistem yang diterapkan TPI Tasik Agung Rembang telah memenuhi prinsip syariat islam dengan dasar keikhlasan yang menguntungkan kedua pihak dalam bertransaksi, kenyamanan bersama, regulasi lelang yang transparan dan akuntabel.
2	Nanda Rizkia (2019). “Pengelolaan	Fungsi manajemen	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan TPI Binuangeun oleh Dinas Perikanan Kabupaten

	UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun Dias Perikanan Kabupaten Lebak”			Lebak masih belum optimal. Berdasarkan data yang ada, minat nelayan untuk menjual ikan di TPI Binuangeun masih rendah sehingga memengaruhi sedikitnya pendapatan TPI dan rendahnya partisipasi karyawan TPI dan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak terhadap pembeli yang berasal dari luar daerah.
3	Susanti (2021). “Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima”	Administrasi publik dan manajemen	Kualitatif deskriptif	Manajemen pengelolaan TPI Desa Bugis di Kabupaten Bima belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui melalui tidak adanya regulasi tertulis, sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi antar karyawan yang buruk, tidak tercapainya target retribusi, serta kurangnya pengawasan terhadap kinerja karyawan.
4	Wahyudi Alamsyah (2022). “Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat	Pengelolaan dan kesejahteraan	Kualitatif deskriptif	Pengelolaan TPI dalam perspektif Ekonomi Islam telah sesuai dengan hukum Islam, karena membiarkan masyarakat bebas bertransaksi jual beli ikan tanpa campur tangan pemerintah, yang tugasnya hanya memfasilitasi proses lelang. Namun, nelayan

	Nelayan di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timr Kota Palopo”			pada Kelurahan Ponjalae dapat dikatakan belum sejahtera pendapatan yang didapat belum mencapai UMR Kota Palopo.
5	Regita Dinda Alfina (2024). “Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA) dalam Mewujudkan Akuntabilitas Lelang di Kabupaten Pati”	Pelayanan publik	Kualitatif deskriptif	Penerapan E-Lelang bernama SIPIPA telah membawa perubahan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan tercapainya aspek responsivitas, keadilan, keterbukaan, efisiensi, dan efektif yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun, pelaksanaan SIPIPA juga masih mengalami hambatan, seperti anggaran jangka pendek, masyarakat yang tidak mau berubah ke arah modern, dan minimnya insentif.

Sumber: Olahan Data Penulis

(Ihtiromah, 2018) meneliti tentang sistem lelang ikan dalam perpektif ekonomi islam yang menunjukkan dengan menggunakan sistem lelang terbuka berbasis penawaran harga tertinggi, TPI Tasik Agung Rembang telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai syariah Islam dalam praktik bisnis perikanan. Perbedaan diantara penelitian yang ditulis oleh Harirotul dengan penelitian ini terletak pada teori yang dipilih dan fokus penelitian, yaitu sistem pelelangan ikan tradisional yang dianalisis dari perspektif Islam, sementara fokus utama peneliti adalah transformasi digital pada sistem

pelelangan ikan menggunakan SIPIPA berdasarkan prinsip transformasi digital dan *e-government*.

Penelitian yang ditulis oleh (Rizkia, 2019) tentang pengelolaan UPT tempat pelelangan ikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lebak menunjukkan hasil bahwa pengelolaan UPT tempat pelelangan ikan masih belum optimal. Hal ini diketahui bahwa hanya sedikit nelayan yang menjual ikannya di TPI Binuangeun, sehingga memengaruhi sedikitnya pendapatan TPI dan rendahnya partisipasi karyawan TPI dan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak terhadap pembeli yang berasal dari luar daerah. Beberapa perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh Rizkia, terletak pada teori fungsi manajemen yang menjadi dasar analisis dan fokus utama dalam penelitian Rizkia pada fungsi manajemen tempat pelelangan ikan yang belum baik, sementara penelitian ini menggunakan teori transformasi digital dan *e-government* untuk menganalisis transformasi digital yang dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II yang mana menunjukkan kinerja yang optimal karena mampu mengatasi permasalahan utama KPLI pada nelayan, kualitas pelayanan yang semakin baik, serta meningkatnya retribusi pada pendapatan daerah.

Pada penelitian yang ditulis oleh (Susanti, 2021) tentang manajemen pengelolaan TPI Desa Bugis di Kabupaten Bima menunjukkan hasil bahwa manajemen pengelolaannya belum berjalan dengan baik. Hal ini diketahui melalui tidak adanya regulasi tertulis, sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi antar karyawan yang buruk, tidak tercapainya target retribusi, serta tidak adanya pengawasan yang cukup terhadap karyawan. Namun, hasil penelitian ini berbeda, dengan adanya

transformasi digital yang dilakukan pada sistem pelelangan ikan membawa sejumlah perubahan yang baik, seperti tidak adanya KPLI, sistem yang cepat, pelayanan yang memuaskan, dan pendapatan daerah yang meningkat.

(Alamsyah, 2022) yang menganalisis pengelolaan TPI dalam kerangka ekonomi Islam demi mencapai kesejahteraan masyarakat nelayan menunjukkan bahwa pengelolaan TPI telah sesuai dalam perspektif hukum Islam karena pemerintah memberikan kebebasan penuh pada masyarakat untuk bertransaksi. Namun, kesejahteraan nelayan di Kelurahan Ponjalae dapat dikatakan belum mendapat kesejahteraannya dikarenakan pendapatannya yang belum mencapai UMR Kota Palopo. Berbeda dengan penelitian ini, selain menggunakan teori transformasi digital dan *e-government*, hasil yang didapat juga berbeda karena adanya SIPIPA akan menghilangkan KPLI, sehingga dengan begitu kesejahteraan masyarakat nelayan pun akan meningkat.

Serta, penelitian dari (Alfina, 2024) yang sama membahas tentang Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati (SIPIPA), menghasilkan temuan bahwa SIPIPA berhasil dilaksanakan dan membawa manfaat yang baik. Namun juga masih ditemui beberapa kekurangan dalam implementasinya yang menjadikannya belum sempurna dan masih harus diperbaiki. Selain itu, terdapat perbedaan yang terletak pada landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ada, sehingga menjadikan fokus utama penelitian ini berbeda.

Tinjauan Pustaka

1.6. 1. Electronic Government (E-Government)

Pada masa perkembangan globalisasi yang terus maju tidak menyurutkan inovasi yang berkembang di dunia pemerintahan. Di dalam dunia pemerintahan, salah satu pengaplikasian dari perkembangan teknologi yaitu lahirnya *electronic goverment (e-government)*. *E-government* adalah cara baru mengelola pemerintahan dengan teknologi sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan teknologi, pemerintah dapat mengelola data dengan cepat dan akurat, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat juga lebih tepat dan cepat. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini adalah dengan mengembangkan *e-government*.

Menurut *World Bank*, *e-government* merupakan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kinerja pemerintahan dalam berinteraksi dengan masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Senada dengan hal tersebut, (Habibullah, 2010) mendefinisikan *e-government* sebagai upaya menciptakan lingkungan penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan tujuan bersama berbagai pihak yang berkepentingan. (Indrajit, 2006) lebih jauh lagi menyatakan bahwa *e-government* merupakan transformasi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sebanding dengan transformasi yang terjadi pada awal era industri.

E-government merupakan penerapan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien. (Yuhefizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyanto, 2017) mendefinisikan e-government sebagai:

- a. *Government to Citizen* (G2C) merupakan model interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuan utama dari model ini adalah untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara keduanya serta memudahkan akses masyarakat terhadap informasi publik.
- b. *Government to Business* (G2B) mengacu pada hubungan langsung antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses pelaku bisnis terhadap berbagai layanan pemerintah dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif.
- c. *Government to Government* (G2G) merupakan bentuk kerja sama yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan memperlancar pelaksanaan proyek-proyek bersama. Melalui G2G, diharapkan dapat terjalin hubungan yang lebih erat antara negara-negara dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang.
- d. *Government to Employees* (G2E) atau hubungan pemerintah dengan pegawai merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Melalui G2E, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

E-government dirancang untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Dengan *e-government*, diharapkan dapat

mempermudah interaksi antara pemerintah dengan berbagai stakeholder, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pengimplementasian *e-government* memberikan kontribusi positif bagi kinerja pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Implementasi *e-government* memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat, di antaranya percepatan pelayanan, kemudahan akses terhadap dokumen elektronik, serta ketersediaan layanan publik selama 24 jam, dan sebagainya. Sedangkan pemanfaatan *e-government* bagi pemerintah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku bisnis, dan industri di berbagai sektor.
- b. Mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
- c. Memotong biaya operasional secara signifikan melalui digitalisasi dan optimalisasi proses kerja, sehingga meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
- d. Menyediakan potensi bagi pemerintah untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksi dengan stakeholder.
- e. Mengembangkan lingkungan masyarakat yang responsif dan adaptif terhadap dinamika global.
- f. Menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak.

Adanya implementasi *e-government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara, terutama dalam hal akses

terhadap layanan publik dan transparansi pemerintahan. Implementasi *e-government* menjadi suatu keharusan mengingat tuntutan akan transparansi pemerintahan dan perkembangan pesat teknologi informasi. Langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam pengembangan *e-government* antara lain:

- a. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pemerintah perlu membangun sistem yang handal dan mudah diakses. Salah satu caranya adalah dengan memastikan ketersediaan jaringan internet yang merata dan menyediakan informasi publik secara online.
- b. Melakukan reorganisasi menyeluruh terhadap sistem dan proses kerja pemerintahan pusat dan daerah dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara.
- c. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk memberikan layanan publik yang lebih baik. Selain menyajikan informasi yang lengkap dan mudah diakses, keamanan data dan transaksi elektronik juga harus menjadi prioritas utama.
- d. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan *e-government* akan mendorong inovasi dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Partisipasi aktif sektor swasta dapat memperkaya ekosistem digital dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
- e. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berbasis digital, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di tingkat pusat maupun daerah,

serta peningkatan literasi digital masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

- f. Implementasi pengembangan sistem akan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pematangan konsep, pemantapan sistem, dan tahap pemanfaatan.
- g. Melaksanakan pengembangan antara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

1.6.1.1. Elemen Sukses Pengembangan *E-Government*

Hasil studi dari Harvard JFK *School of Government*, menunjukkan bahwa dalam penerapan konsep pengembangan *e-government*, terdapat 3 kunci elemen kesuksesan dari pengembangan *e-government*, diantaranya:

a. Dukungan

Prasyarat mutlak bagi keberhasilan *e-government* adalah adanya niat tulus dari para pejabat publik untuk menerapkan konsep ini secara serius. Niat untuk menerapkan *e-government* harus murni dan didasarkan pada keyakinan akan manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan dari pihak lain. Dukungan terhadap *e-government* harus lebih dari sekadar ucapan, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan konkret. *E-government* telah diakui sebagai salah satu kunci keberhasilan bangsa, sehingga harus menjadi prioritas utama. Selain komitmen politik, pengembangan *e-government* juga memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai, serta kerangka hukum yang jelas dan lembaga khusus yang

bertanggung jawab. Pemerintah perlu menyediakan dukungan yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan *e-government*.

b. Kapasitas

Elemen ini mencakup 3 hal dasar yang harus dipenuhi, yaitu kemampuan SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi, manajemen proyek, dan kebijakan publik. Mereka harus mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem *e-government*. Kemudian, Ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, serta sistem keamanan yang handal. Serta dana yang cukup untuk membiayai seluruh proses pengembangan dan pemeliharaan sistem *e-government*, termasuk pengadaan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, pelatihan pegawai, dan operasional.

c. Manfaat

Agar *e-government* berhasil, pemerintah harus fokus pada pengembangan aplikasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Keberhasilan *e-government* tidak hanya dinilai dari sisi teknologi, tetapi juga dari sejauh mana inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan *e-government* agar inovasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

1.6.2. Konsep Transformasi Digital

1.6.2.1. Pengertian Transformasi Digital

Transformasi merupakan suatu perubahan yang akan selalu sejalan dengan perkembangan manusia. Perubahan ini terjadi akibat dari pengaruh unsur dari dalam maupun dari luar yang menuju pada perubahan yang mengganti dari gagasan atau konsep sebelumnya (Antoniades, 1990).

Transformasi digital merupakan perubahan berwawasan ke masa mendatang berdasarkan pemanfaatan teknologi informasi yang cemerlang demi meningkatkan kegunaan perusahaan dalam melayani pelanggan. Pemanfaatan teknologi informasi ini menggunakan teknologi virtualisasi, komputasi seluler, komputasi awan (cloud computing), sistem terintegrasi, dll (Loonam et al., 2018). Terjadinya transformasi digital merupakan sebuah efek yang dihasilkan dari penggunaan gabungan inovasi digital dalam memperbaiki struktur organisasi, nilai, prosedur, posisi atau ekosistem dan lingkungan eksternal organisasi (Hinings et al., 2018).

(Morakanyane et al., 2017) telah menganalisis berbagai literatur dalam (Hadiono & Santi, 2020) menyimpulkan arti dan menerangkan bahwa transformasi digital adalah perkembangan yang memanfaatkan keterampilan dan digitalisasi untuk memodifikasi mekanisme bisnis dan operasional demi meningkatkan nilai tambah perusahaan dan kepuasan konsumen. Berdasarkan berbagai definisi-definisi tersebut bisa dengan mudah dipahami bahwa transformasi digital adalah proses yang mengagumkan yang membelit sumber daya teknologi digital untuk mendukung inovasi

dari organisasi agar memberikan pengalaman baru, misalnya kemudahan bertransaksi, kemudahan proses administrasi, berbelanja, berkomunikasi, dan lain sebagainya.

Kini, beragam organisasi baik pemerintah maupun swasta, telah mengadopsi sistem digital di berbagai bidang sebab sistem konvensional terdahulu telah dipandang sebagai sistem yang kuno dan tidak efektif. Maka dari itu, transformasi digital dipahami selaku perubahan proses analog menjadi proses digital. Untuk memudahkan proses administrasi pelelangan ikan di TPI Juwana unit II Pati, dibutuhkan sebuah transformasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah sistem pelelangan ikan yang semula masih tradisional menjadi sistem pelelangan elektronik.

1.6.2.2. Tujuan Transformasi Digital

Tujuan transformasi adalah untuk memperbaiki atau mengganti sistem yang ada untuk menghasilkan output yang berkualitas. Sasaran dilakukannya transformasi digital pada suatu lembaga ialah memastikan kesanggupan menembus dunia digital karena perkembangan kehidupan manusia yang dinamis (Osmundsen et al., 2018). Sejumlah tanda kesanggupan untuk melakukan transformasi digital pada suatu lembaga atau organisasi ialah melahirkan inovasi produk yang lebih unggul dan menyempurnakan mekanisme bisnis yang disruptif dalam kompetisi meraih keuntungan. Maka dari itu, transformasi digital akan melebarkan aliran distribusi bisnis dalam dunia digital yang dapat menarik dan mengerti keinginan konsumen.

Transformasi digital pada sistem pelelangan ikan memiliki tujuan utama untuk mempermudah administrasi kegiatan pelelangan ikan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati. Sistem pelelangan ikan tradisional dengan pembayaran tunai akan diubah menjadi pelelangan ikan yang berbasis sistem komputer dengan pembayaran non tunai. Dengan transformasi ini, diharapkan aktivitas pelelangan ikan di TPI Juwana unit II dapat berjalan dengan bersih, disiplin, dan saling menguntungkan.

1.6.2.3. Faktor dan Tahapan Transformasi Digital

Setiap perubahan akan terlaksana ketika terdapat beberapa komponen yang mendukungnya. Terlaksananya transformasi digital dapat diwujudkan melalui sejumlah komponen, seperti perubahan peraturan, prospek kompetisi, peralihan ke bentuk digital, dan perubahan perilaku konsumen (Hadiono & Santi, 2020). Transformasi digital yang dilakukan oleh sektor pelayanan publik diakibatkan oleh berubahnya peraturan yang didasari oleh Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi secara *online* dan perubahan perilaku masyarakat yang lebih banyak menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan teknologi digital yang dimiliki masyarakat akan sesuai dengan era digital yang disajikan oleh pemerintah.

Pada aktivitas pengelolaan pelelangan ikan, terkandung beberapa aspek yang mempengaruhi untuk dilakukannya transformasi digital, antara lain adanya perubahan kasus kekurangan pembayaran lelang ikan (KPLI) dilakukan oleh oknum bakul ikan,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebijakan dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Teknologi yang terus berkembang mempengaruhi manusia dalam bergerak, berkomunikasi, dan berinteraksi. Berbagai aplikasi menawarkan fitur-fitur yang memungkinkan layanan dan kehidupan yang lebih praktis bagi generasi milenial yang serba digital. Namun, pada setiap transformasi membutuhkan beberapa fase. Menurut (Najoan & Mandey, 2011), terjadinya transformasi terdiri dari tiga fase yaitu penemuan baru, difusi, dan konsekuensi.

- a. Penemuan baru yaitu adanya suatu temuan atas peristiwa berbeda dari sebelumnya yang terjadi dalam masyarakat sehingga mendorong suatu perubahan.
- b. Difusi yaitu penyebaran gagasan atau konsep baru untuk mengubah tata kehidupan bermasyarakat.
- c. Konsekuensi atau hasil perubahan gagasan atau konsep baru yang diubah dalam masyarakat.

Menurut beberapa fase dalam proses transformasi tersebut, diketahui bahwa fase transformasi yang terjadi telah sampai pada penerimaan konsekuensi atas hasil perubahan yang terjadi.

Selain itu, terdapat beberapa parameter pada transformasi digital (Raharjo, 2019), antara lain:

a. Keberadaan aktif online

Parameter yang paling terlihat pada transformasi digital adalah peristiwa digitalisasi pada kehidupan yang menyediakan pilihan untuk beraktivitas secara online atau hybrid.

b. Penjualan sistem

Terjadinya perubahan proses penjualan yang sebelumnya dilakukan secara manual telah diganti menggunakan teknologi digital dengan tujuan efisiensi.

c. Kolaboratif

Dengan bantuan media digital, kita akan selalu terhubung dengan orang lain yang mendorong terciptanya kolaborasi yang berdampak positif di tempat kerja.

d. Penyederhanaan operasi

Semula cara kerja dan berbisnis manual disederhanakan secara digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi.

e. Kapitalisasi dan penggunaan data

Digitalisasi telah memungkinkan terciptanya database yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi pasar, produk, dan pelayanan.

f. Bertahan selama masa pandemic

Digitalisasi sangat efektif untuk mempertahankan bisnis di tengah pandemic karena fleksibel dan praktis.

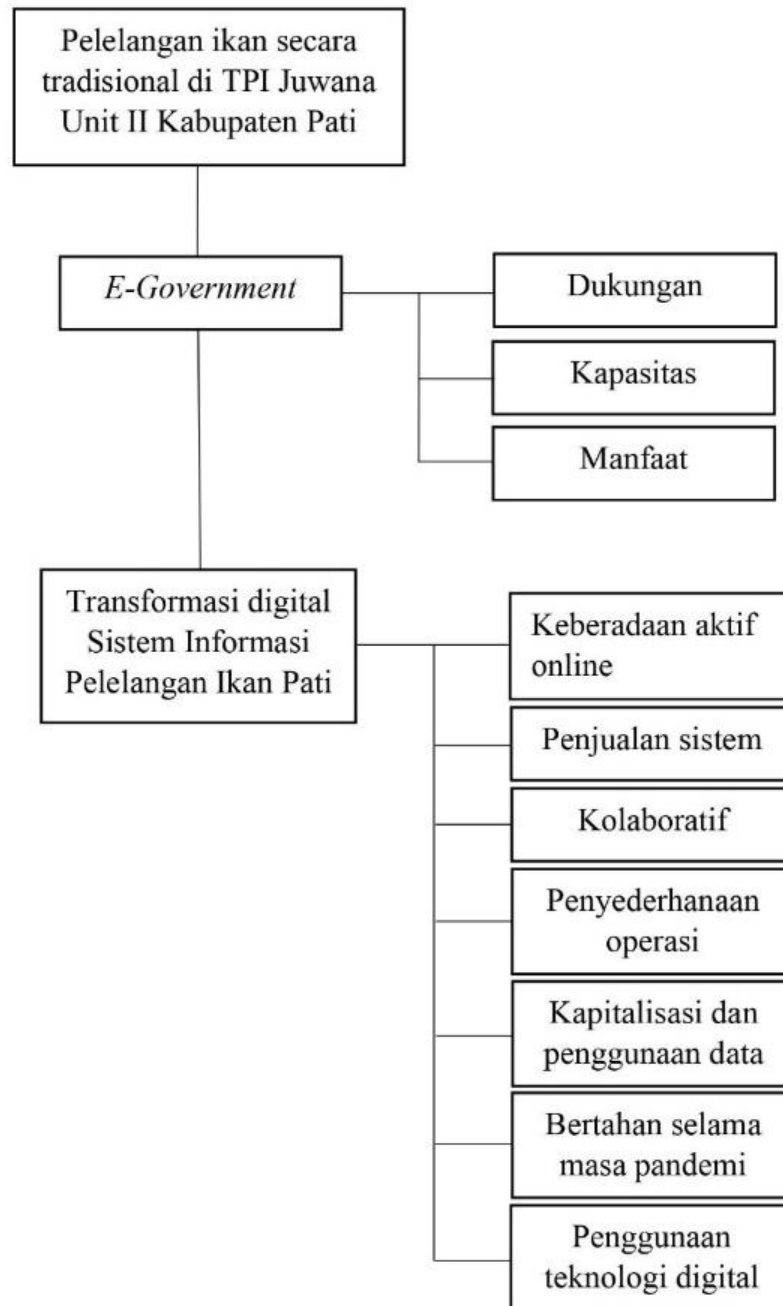
g. Penggunaan teknologi digital

Digunakannya beragam teknologi digital seperti virtualisasi, komputasi seluler, dan sistem terintegritas akan mendorong efisiensi.

1.7. Kerangka Berpikir

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pengelolaan pelelangan ikan di TPI Juwana unit II yang masih menggunakan sistem tradisional dengan pembayaran tunai, ditemui beberapa permasalahan seperti kecurangan bakul ikan yang memperlalakan pembayaran sehingga nelayan mendapat kerugian karena tidak menerima upah secara utuh. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi *e-government* untuk mendukung berjalannya suatu keefektifan kinerja. Pemerintah Kabupaten Pati melakukan transformasi digital sebagai turunan dari *e-government* melalui sistem informasi pelelangan ikan Pati (SIPIPA) dengan tujuan memudahkan sistem administrasi pelelangan ikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pati melalui pelayanan prima, dan optimalisasi PAD. Pada kegiatan pelaksanaan SIPIPA ini akan diketahui persiapan implementasinya dan hambatan atau tantangan yang akan dihadapi.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Data Penulis

1.8. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini akan menjelaskan fenomena transformasi dari sistem pelelangan ikan tradisional di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati yang diubah menjadi sistem digital, dengan landasan teori pengembangan *e-government* dan transformasi digital. Perubahan sistem pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati harus memenuhi aspek pengembangan *e-government*, yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak yang mencakup payung hukum, finansial, dan infrastruktur yang mendukung, lalu kapasitas SDM dan teknologi yang mumpuni, serta manfaat yang harus dirasakan oleh seluruh penggunanya. Selain itu, untuk membuktikan keberhasilan transformasi digital pada sistem pelelangan ikan harus memenuhi 7 parameter transformasi digital, diantaranya adalah penggunaan aktif online, adanya kolaborasi dengan para *stakeholder*, penjualan sistem yang meningkat, kapitalisasi dan penggunaan data yang mementingkan privasi data pengguna, operasi lelang yang dipersingkat dan memudahkan penggunanya, mampu bertahan selama pandemic, serta menggunakan teknologi digital.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan suatu gejala sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan yang cocok untuk meneliti suatu kondisi atau situasi objek penelitian (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi. Di dalam pendekatan ini, penulis

melaksanakan serangkaian metode penyelesaian masalah dengan mendeskripsikan objek yang kemudian dianalisis berdasarkan data yang ditemukan dengan cara deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menjabarkan dan mengulas secara detail tentang kondisi pelelangan ikan dan proses transformasi sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di TPI Juwana Unit II, tepatnya di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fokus utama penelitian ini adalah wawancara terhadap para nelayan dan bakul ikan terkait proses transformasi sistem pelelangan ikan yang sedang dilaksanakan. Penelitian ini juga mengulas adanya fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sebelum dilakukannya transformasi sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait yang akan diteliti dalam penelitian. Menurut (Amirin, 1995), subjek penelitian ialah sumber dari mana informasi penelitian diperoleh dan dicari. Subyek penelitian juga bisa diartikan tempat dimana variabel berada, dimana subjek dijadikan sebagai pusat perhatian atau sasaran peneliti (Anshori & Iswati, 2009). Tujuan dari adanya subjek penelitian yaitu untuk memberikan batasan subjek pada penelitian dalam bentuk produk, penggunaan data terhadap variabel yang terkait, serta apa yang menjadi permasalahannya (Arikunto, 2016). Subjek daripada penelitian ini adalah narasumber yang berkaitan dengan transformasi digital sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II.

Berdasarkan definisi serta tujuan subyek di atas, narasumber dari penelitian yang berkaitan dengan transformasi digital sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II Kabupaten Pati adalah sebagai berikut;

1. Bakul ikan yang membeli ikan di pelelangan ikan TPI Juwana unit II Kabupaten Pati,
2. Nelayan yang mengikuti lelang di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati,
3. Admin SIPIPA, Karyawan Tata Usaha dan Bidang Keuangan TPI Juwana unit II Kabupaten Pati,
4. Karyawan Bidang Pengelolaan dan Pengembangan TPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

1.9.4. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder. Sumber data dari hasil wawancara serta mengamati sumber-sumber yang terkait ialah data primer. Sementara data sekunder diperoleh dari beberapa literasi yang didapatkan dari buku cetak, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas topik dan tema ini, dan laman website.

1.9.4.1. Data Primer

Data primer didapatkan melalui pengumpulan data langsung di lapangan (Sugiyono, 2010). Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan narasumber serta observasi secara langsung. Data primer ini berasal dari wawancara dengan informan yang termasuk dalam subjek penelitian.

1.9.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber-sumber lain seperti literatur, buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait, situs resmi suatu instansi, dan sumber lainnya yang relevan dengan focus penelitian ini.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1.9.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas percakapan secara langsung yang dilakukan antara peneliti dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini, wawancara diselenggarakan dengan tokoh yang terikat dalam proses transformasi digital pada sistem pelelangan ikan di TPI Juwana unit II Kabupaten Pati, yaitu nelayan, bakul ika, Pegawai TPI Juwana Unit II Kbabupaten Pati pada Bidang Keuangan dan Tata Usaha yang mengawasi jalannya SIPIPA, serta Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

1.9.5.2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu fenomena, peristiwa, atau perilaku yang terjadi. Sederhananya, observasi adalah melihat, mengamati, dan mencatat apa yang terjadi di lapangan. Observasi ini dilakukan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

1.9.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melacak data historis dalam penelitian sosial (Bungin, 2005). Data yang diperoleh adalah foto wawancara, data produksi, visi dan misi, struktur organisasi, fasilitas, prosedur penarikan retribusi TPI, dan prosedur pelelangan di TPI Juwana unit II Kabupaten Pati.

1.9.5.4. Studi Pustaka

Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh data dengan memanfaatkan sumber perpustakaan. Studi pustaka ini peneliti peroleh dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur yang terkait dengan topik transformasi pelelangan ikan.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Model analisis (Miles et al., 1992) terdiri dari tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai model analisis ini.

1.9.6.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data mentah yang kompleks menjadi informasi yang lebih terfokus dan mudah dianalisis. Proses ini melibatkan pemilihan data yang relevan, pengabstraksian konsep-konsep penting, dan transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Dengan mereduksi data, peneliti dapat menyaring informasi yang tidak relevan, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, dan mengorganisasi data sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mempersiapkan data agar siap dianalisis lebih lanjut dan menghasilkan temuan penelitian yang valid.

1.9.6.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah upaya menjabarkan hasil data yang telah terkumpul dan direduksi. Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai gabungan bahan terstruktur yang memungkinkan ditariknya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Oleh karena itu, penyajian data yang valid bagi analisis kualitatif terdapat beberapa jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram.

1.9.6.3. Penarikan Kesimpulan

Setelah menyajikan data, tahap akhir dari analisis data yaitu menarik kesimpulan beserta verifikasi. Kesimpulan ditarik untuk menemukan makna hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan ini dapat diverifikasi selama penelitian. Dari sajian data yang ada, dapat diperiksa hasilnya untuk memperjelas kebenaran dan dapat pertanggungjawabkan.